

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tuban

Putri Ayu Romadhotin¹, Syunu Trihantoyo², Gunawan Santoso³

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

³Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding email: Putri.22060@mhs.ac.id

Abstrak - Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan dalam suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Komitmen pendidikan bangsa Indonesia, ditegaskan dalam konstitusi UUD'45 Pasal 31, untuk menjamin hak mendapatkan pendidikan tiap warganya. Landasan konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan kedalam kebijakan pemerintah, salah satunya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan tahun 2005. Program BOS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi tiap lapisan masyarakat Indonesia, guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah dasar di Kab.Tuban. Dengan menggunakan model prisma, data diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program dana BOS pada sekolah dasar di Kab.Tuban.

Kata kunci: *Pengelolaan, Keuangan, Evaluasi.*

Abstract - Education is one of the factors that influences development in a country, including Indonesia. The commitment to education of the Indonesian nation, is confirmed in the Constitution of the UUD'45 Article 31, to guarantee the right to education for every citizen. This constitutional basis was then translated into government policy, one of which was the School Operational Assistance Program (BOS) which was launched in 2005. The BOS program aims to provide the widest possible access to education for every level of Indonesian society, in order to realize equitable and quality education. This research aims to evaluate the management of School Operational Assistance funds in elementary schools in Tuban Regency. Using a prism model, data was obtained through literature study of related literature. The results of the research show that the management of the BOS fund program in elementary schools in Tuban Regency.

Keywords: *Management, Finance, Evaluation.*

Pendahuluan

Pendidikan menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan perkembangan sejarah, pendidikan telah diakui sebagai kebutuhan esensial dalam masyarakat karena dipandang sebagai bagian integral dari proses sosial. (Agustin & Cahyono, 2017) (Simaremare et al., 2023). Pendidikan juga dianggap sebagai kebutuhan esensial bagi suatu negara, masyarakat, dan tiap individu. Setiap fase kehidupan manusia

membutuhkan pendidikan, baik secara formal maupun informal, karena pada dasarnya, manusia memiliki dorongan untuk mengeksplorasi pengetahuan baru. (Gultom, 2011) (Santoso, Khairasyani, Listiani, Rachmadani, et al., 2023). Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bagian I Pasal 1, yang membicarakan tentang "Sistem Pendidikan Nasional", dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang kompleks dan saling terhubung untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. (Utari, 2007).

Keuangan sekolah perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Manajemen keuangan sekolah merupakan hal yang krusial guna memastikan bahwa alokasi dana yang diterima dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik dari segi efektivitas maupun efisiensi (Santoso, 2019). Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2011:2) Memberikan penjelasan bahwa manajemen merupakan gabungan dari ilmu dan seni yang berkaitan dengan pengaturan proses penggunaan sumber daya manusia dan aset lainnya secara optimal guna mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efisiensi dan efektivitas . Penerapan prinsip pemisahan tugas, perencanaan, pencatatan transaksi secara terperinci, pelaporan, dan pengawasan merupakan kunci dalam menjalankan pengelolaan keuangan sekolah yang efektif. (Fitri, 2014) (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, & Murod, 2023).

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum mencapai tingkat optimal karena masih dihadapkan pada beberapa hambatan, salah satunya adalah tingginya biaya pendidikan. (Nurhuda et al., n.d.). Kenaikan biaya pendidikan tidak hanya terbatas pada institusi pendidikan swasta, melainkan juga dapat diamati di lembaga-lembaga pendidikan negeri. Meskipun merupakan sekolah negeri, biaya pendidikan yang dikenakan masih dianggap tinggi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. (Muzadzi, 2013) (Santoso, Rahmawati, et al., 2023). Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap mahalnya biaya pendidikan meliputi fluktuasi gaji guru, kenaikan harga barang, penambahan jumlah murid di sekolah negeri, perubahan dalam standar pendidikan, permintaan akan pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan jumlah siswa yang putus sekolah.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menysasar seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka, baik dari keluarga dengan ekonomi yang mapan maupun yang berada di kelas menengah ke bawah. (Siswanto, 2017) (Himawan et al., 2023). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperkenalkan pada tahun 2005 dengan tujuan utama untuk mengurangi beban biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas pembelajaran bagi siswa. Program BOS merupakan inisiatif pemerintah dalam menjalankan kebijakan wajib belajar 9 tahun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 yang mengatur pendanaan pendidikan, biaya non-personalia mencakup pengeluaran untuk barang-barang yang digunakan sekali pakai serta biaya tak langsung seperti transportasi, konsumsi, dan sebagainya (Pardede & Simanjuntak, 2020) (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, Sapriya, et al., 2023). Pasal 34 Ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar tanpa biaya bagi semua individu yang wajib belajar. Selain itu, Pasal 17 Ayat 2 juga mengindikasikan bahwa pendidikan dasar dapat berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), atau bentuk serupa. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar. (Ekonomika et al., 2014) (Manurung et al., 2023).

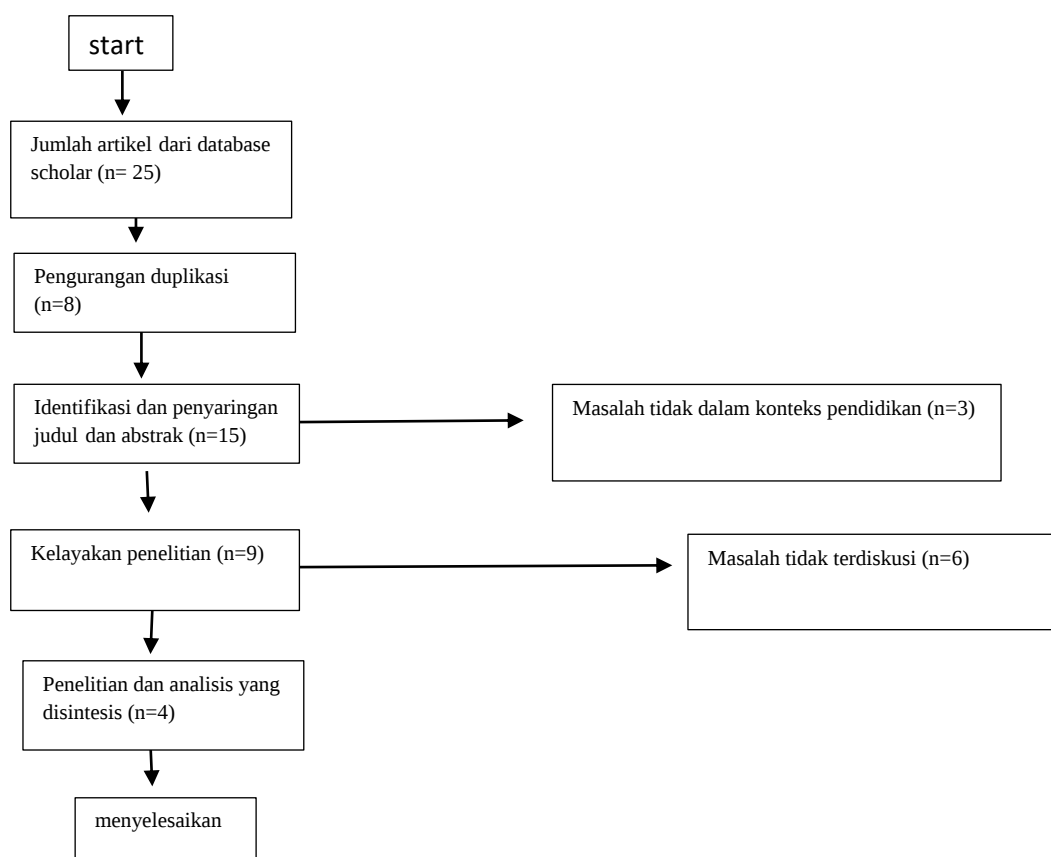
Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terkesan tidak transparan. Tidak banyak sekolah yang mengumumkan informasi tentang dana BOS melalui papan informasi. Secara umum, hanya kepala sekolah yang memiliki pengetahuan tentang dana BOS tersebut (Himawan et al., 2023). Pengelolaan dana ini dilakukan tanpa melibatkan para guru karena kurangnya transparansi, yang meningkatkan risiko penyalahgunaan dana BOS. Hampir semua insiden penyalahgunaan dana BOS disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaannya. Dana tidak dialokasikan berdasarkan kebutuhan sekolah, tetapi tergantung pada ketersediaan anggaran. Seharusnya, alokasi dana didasarkan pada kebutuhan masing-masing sekolah agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebutuhan dengan anggaran yang tersedia. (Iik, 2017) (Adelia et al., 2022).

Fokus dari artikel ini adalah menilai keefektifan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tuban. Sebagai bagian dari masyarakat, para wali murid memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan dana BOS, oleh karena itu mereka berhak mendapatkan informasi terkait dana BOS di sekolah yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Tuban dengan menggunakan teori Evaluasi Kriteria sebagai dasar evaluasi suatu kebijakan publik.

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan model prisma (Item Pelaporan Pilihan untuk Tinjauan Sistematis dan Meta-analisis) sebagai metode penelitiannya. Menurut pendapat (Albi Anggito, 2018), Penelitian kualitatif menawarkan berbagai metode yang beragam, memungkinkan peneliti untuk memilih di antara berbagai pilihan tersebut sesuai dengan kecocokan dengan objek penelitian yang dituju (Bosawer et al., 2023). Dalam penelitian kualitatif, penting untuk melakukan analisis data secara teliti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat disajikan dengan akurat, sehingga menghasilkan temuan yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan memanfaatkan tinjauan literatur, seperti yang dikemukakan oleh Syaibani (2012) sebagaimana disebutkan dalam tulisannya (Azizah & Purwoko, 2017), Studi

Kepustakaan merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan topik atau isu yang sedang atau akan diteliti. Dalam konteks ini, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di berbagai sekolah di Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu tinjauan literatur yang telah disesuaikan dengan topik yang akan dibahas dalam artikel tersebut (Khusna, 2021) (Avifah Dwi Apriliani et al., 2022). Informasi data ini diperoleh dari tinjauan jurnal, artikel, dan sumber informasi terkait yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.



Berdasarkan proses tersebut, peneliti melakukan pencarian artikel menggunakan kata kunci yang telah ditentukan (n=25). Pada tahap berikutnya, peneliti meninjau setiap artikel untuk memastikan bahwa tidak ada artikel yang sama (n=8). Selanjutnya, peneliti menyaring artikel berdasarkan judul dan abstrak serta mengidentifikasi artikel yang tidak relevan dengan konteks pendidikan (n=15), sehingga tersisa artikel yang relevan (n=4). Pemilihan lanjutan dilakukan dengan membaca keseluruhan artikel; dari hasil penilaian, beberapa artikel tidak membahas peran guru dan kepala sekolah (n=3), sehingga hanya beberapa artikel yang memenuhi kriteria (n=6). Dari kumpulan data artikel ini, dilakukan sintesis dan analisis pada enam artikel yang dipilih, yang kemudian digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Prioritas pemerintah terhadap permasalahan pendidikan harus diperhatikan, karena kualitas pendidikan suatu bangsa berdampak secara signifikan pada kemajuan bangsa tersebut. Ini tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, tetapi juga memerlukan keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaannya (Santoso et al., 2022). Upaya untuk memperluas akses pendidikan harus sejalan dengan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, yang harus diupayakan oleh semua komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional, termasuk lingkungan, fasilitas, sumber daya, dan masyarakat. Seluruh pihak, termasuk pemerintah dan individu, harus memiliki tekad yang kuat untuk mencapai standar pendidikan yang bermutu (Fitri, 2014) (Maulana et al., 2023). Secara konseptual, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup berbagai komponen untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah. Namun, dalam implementasinya, karena penggunaan biaya satuan yang merujuk pada biaya rata-rata nasional, BOS dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan lain yang bukan hanya terbatas pada kebutuhan operasional, termasuk biaya investasi dan biaya lainnya yang terkait dengan pengelolaan sekolah. (Menengah & Negeri, 2008) (Khoirroni et al., 2023).

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan penduduk hanya mencapai 6,95 tahun di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Tuban yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (Bosawer et al., 2023). Selama enam tahun terakhir, rata-rata lama pendidikan penduduk Tuban tidak mengalami perubahan yang besar, tetap berada di sekitar 6 tahun. Data BPS Tuban menunjukkan bahwa pada tahun 2015, rata-rata lama pendidikan penduduk Tuban adalah 6,2 tahun, kemudian meningkat menjadi 6,25 tahun pada tahun 2016, 6,48 tahun pada tahun 2017, 6,52 tahun pada tahun 2018, 6,81 tahun pada tahun 2019, dan mencapai 6,95 tahun pada tahun 2020. Meskipun terjadi peningkatan yang konsisten, peningkatan ini tidak signifikan. (Sarmini et al., 2013).

Pada tahun 2022, penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tuban ditetapkan sebagai berikut: setiap siswa tingkat SD/MI mendapatkan dana sebesar Rp930.000, siswa tingkat SMP/MTS mendapatkan Rp1.130.000, dan siswa tingkat SMA/MA mendapatkan Rp1.540.000. Besarannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dihitung secara langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), termasuk juga ketentuan mengenai indikator untuk peningkatan alokasi dana tersebut. Mulai tahun 2021, jumlah dana BOS untuk tiap kabupaten/kota menjadi berbeda, berbeda dengan tahun 2020 di mana jumlah yang diterima oleh tiap daerah di Indonesia memiliki nominal yang serupa. Dibandingkan dengan Lamongan dan Bojonegoro, kenaikan dana BOS di Tuban pada tahun tersebut paling minim. (Tuban, 2023) (Kudori et al., 2024).

Kebijakan perubahan dalam penyaluran Dana BOS pada tahun 2022 terbukti lebih efektif dan efisien daripada kebijakan tahun sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2022 yang disebutkan dalam jurnal tersebut (Oktavia Dwi, Trihantoyo Syunu, 2023). Dalam peraturan tersebut, terdapat persyaratan untuk menerima Dana BOS Reguler serta ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah. Beberapa persyaratan dan kriteria sekolah untuk mendapatkan Dana BOS reguler adalah sesuai dengan (Fitriah, 2021), Beberapa persyaratan untuk sekolah menerima Dana BOS reguler adalah sebagai berikut: a) Sekolah harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar dalam Database Pendidikan (Dapodik). b) Sekolah harus mengisi dan memperbarui data Dapodik sesuai dengan kondisi aktual di Satuan Pendidikan, dan hal ini harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahun. c) Sekolah harus memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik. d) Sekolah harus memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan tersebut. e) Sekolah tidak boleh merupakan satuan pendidikan kerjasama. f) Sekolah tidak boleh merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain.

Di samping persyaratan untuk mendapatkan Dana BOS Reguler, dalam ketentuan Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2022 juga tercantum persyaratan untuk mendapatkan Dana BOS Kinerja, yang mencakup kategori sekolah penggerak dan sekolah berprestasi. (Sampul, 2023) (Sodikin et al., 2024). Persyaratan untuk menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja bagi sekolah penggerak adalah sebagai berikut: a) Sekolah harus telah menerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran yang berjalan. b) Sekolah harus telah dipilih oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Sedangkan untuk menerima Dana BOS Kinerja bagi Sekolah Berprestasi, beberapa syaratnya antara lain: a) Sekolah harus telah menerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran yang sedang berjalan. b) Sekolah harus memiliki minimal 3 (tiga) Peserta Didik yang meraih prestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam periode 2 (dua) tahun terakhir. c) Sekolah harus telah meraih prestasi di tingkat nasional dan/atau internasional. d) Sekolah tidak termasuk dalam kategori yang ditunjuk sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.

Dalam konsepnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merujuk pada sumber dana untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Namun, dalam praktiknya, karena menggunakan biaya satuan yang berdasarkan rata-rata nasional, BOS dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lain yang tidak terkait dengan pengeluaran pribadi, seperti biaya investasi dan biaya personil (Santoso, Khairasyani, Listiani, Rachmadani, et al., 2023). BOS diberikan kepada kepala sekolah dengan tujuan membantu mengurangi biaya sekolah yang seharusnya dibebankan kepada siswa, sehingga sekolah tetap dapat memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada siswa. (Menengah & Negeri, 2008).

Program Bantuan Operasional Sekolah telah dikenal oleh masyarakat sejak tahun 2005, saat program ini pertama kali diterapkan. Sejak itu hingga saat ini, program BOS telah dikenal oleh masyarakat selama kurang lebih 15 tahun, sehingga banyak yang mengerti tentang dana BOS. Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah dasar di Tuban telah terbukti efektif, dengan tujuan program BOS yang berhasil tercapai. Program BOS ini telah berjalan secara konsisten selama bertahun-tahun tanpa ada gangguan dalam pelaksanaannya. Pengelolaan dana BOS oleh sekolah telah memenuhi harapan orang tua atau wali murid (Www.kemkes.go.id, 2020) (Santoso, Marsella, Permana, & Syifa, 2023).

Selama lima belas tahun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diterapkan, terjadi dampak yang penting dalam mempercepat peningkatan kualitas program wajib belajar 9 tahun. Dana BOS telah memperkuat kapasitas sekolah dalam menyediakan fasilitas yang meningkatkan pembelajaran, seperti membeli buku pelajaran dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan siswa di bidang lainnya (Santoso & Muhtadin, 2022). Pemberian BOS memberikan harapan besar untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan keuangan. Sebagai bantuan biaya pendidikan, program BOS telah membuka akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga dicapai melalui kegiatan tambahan yang didukung oleh dana BOS sekolah. Besarnya alokasi anggaran pendidikan, yang setidaknya mencapai 20% dari APBN, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap sektor pendidikan. Dana ini kemudian dialokasikan untuk berbagai program pendidikan. Penyaluran dana BOS telah mengalami beberapa perubahan mekanisme sebagai hasil dari evaluasi yang dilakukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang mengatur panduan umum penyelenggaraan pelayanan publik, pelayanan publik merujuk pada sejumlah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Abdullah et al., 2023). Pelayanan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Tuban dalam hal pengentrian data telah dievaluasi sebagai cukup baik; mereka melakukan pengentrian data seperti nomor kartu keluarga (KK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan akta kelahiran. Namun, terdapat beberapa sekolah yang kurang memberikan informasi yang memadai; sebagai contoh, beberapa sekolah tidak menampilkan papan informasi terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (Hasana, 2019). Pemberian BOS memberikan harapan besar untuk mengurangi beban finansial masyarakat, sehingga mereka dapat meneruskan pendidikan tanpa terkendala oleh masalah keuangan. Sebagai bentuk subsidi biaya pendidikan, program BOS telah memperluas jangkauan akses pendidikan, sehingga sekarang lebih mudah diakses oleh masyarakat di daerah terpencil. Sekolah yang mendapat dana ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi setiap penerima.

Tanggung jawab pengelolaan dana tersebut ada pada kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. (Ilmu et al., 2018).

Kesimpulan

Konsep Bantuan Operasional Sekolah meliputi pembiayaan kebutuhan operasional sekolah, namun dalam praktiknya, karena menggunakan biaya satuan yang merujuk pada rata-rata nasional, BOS dapat digunakan secara fleksibel. Program Bantuan Operasional Sekolah sudah dikenal oleh masyarakat sejak tahun 2005 ketika program ini pertama kali diterapkan. Selama kurang lebih 15 tahun, program BOS telah dikenal secara luas oleh masyarakat, sehingga banyak yang mengetahui tentangnya. Pemberian BOS memberikan harapan besar untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan tanpa hambatan biaya. Sebagai bentuk subsidi biaya pendidikan, program BOS telah berhasil memperluas akses pendidikan, sehingga sekarang lebih mudah diakses oleh masyarakat di daerah terpencil. Sebagai kepala sekolah dan guru, penting untuk memperhatikan saran dan implementasi yang berguna dalam pengelolaan pendidikan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat membantu Anda: Menyusun rencana strategis pendidikan yang jelas dan terukur. Melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru. Menerapkan teknologi pendidikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja siswa secara berkala.

Referensi

- Abdullah, N., Jabri, A., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Critical Thinking 21 st Century Era 4 . 0 Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 17–21.
- Adelia, P., Junsap, R. M., Mustika, N. I., & Santoso, G. (2022). *Pengaruh Metode Inkluiuri Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasa r Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(03), 156–163.
- Agustin, A. W., & Cahyono, H. (2017). Pengaruh Pendidikan Tinggi dan Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3), 1–8.
- Albi Anggito, johan setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (first). CV Jejak.
- Avifah Dwi Apriliani, N., Chairudin, M., Hariyanti, S., Puteri Ramadhanti, E., Afriza Aprilian, M., Nuur Fauzaan, M., & Santoso, G. (2022). Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Transpormatif (Jupetra)*, 1(2), 156–164.
- Azizah, A., & Purwoko, B. (2017). Library Research of the Basic Theory and Practice of Narrative Counseling. *Jurnal BK UNESA*, 7(2), 1–8.
- Bosawer, A., Santoso, G., Wuriyani, D., & Anggo, A. Y. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Strategi Pemulihan Sektor Parawisata Melalui Model Kreatif , Inovasi , Dan Problem Solving Di Kabupaten Raja Ampat Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*. 02(04), 127–132.
- Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2014). *Mensukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kota Semarang*.

- Fitri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1), 33–831.
- Fitriah, M. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Pendidikan di SMA Negeri 43 Jakarta. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Gultom, A. F. (2011). *Guru Bukan Buruh*. PENERBIT SERVAMINORA (ANGGOTA IKAPI).
- Hasana, U. (2019). Volume 15 no 1 tahun 2019 acton. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan Di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*, 15(1), 55–86.
- Himawan, M. G., Nurjannah, R. N., Amani, A. A., Sa, P., Metalin, A., Puspita, I., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Harmoni Integrasi Nasional dalam Kegiatan Aktivis Sosial Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*. 02(05), 1–8.
- Iik, A. (2017). Jurnal ekono logi ISSN 2355-6099 195. *Penerapan Analisis Swot Dan Manajemen Mutu Terpadu (Tqm) Dalam Penetapan Strategi Pemasaran Toserba*, 4(April), 195–202.
- Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2018). *Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa 2018*.
- Khoirroni, I. A., Patinasarani, R., Hermayanti, N. I., & Santoso, G. (2023). Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Pendidikan Karakter : Tingkat Anak Sekolah Dasar di Era Digital Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(02), 269–279.
- Khusna, M. (2021). Determinan Perilaku Perineal Hygiene Pada Remaja Putri: Literature Review. *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Kudori, M., Santoso, G., Alfatih, A., & El-abid, M. (2024). Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Pengembangan Tarian Adat Moi Kreasi Baru Melalui Karakter Berekebinekaan Global Pada Siswa Kelas 7 Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(04), 95–101.
- Manurung, I. M., Asbari, M., Putra, A. R., Santoso, G., & Rantina, M. (2023). Unity in Salinity: Bagaimana Hidup Tanpa Garam? *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 6–10.
- Maulana, M. F., Gunawan, A., Azzahra, F., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Tarian Keberuntungan yang Rumit : Mengurai Paradoks Nasib Buruk Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 68–72.
- Menengah, S., & Negeri, P. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Pasca Sarjana UnDip*, 1–151.
- Muzadzi, T. (2013). No Titleהקדמה: מצב תמונת ההקדמה עליון, 66(1997), 37–39.
- Nurhuda, H., Tinggi, S., & Islam, A. (n.d.). *Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan National Education Problems ; Factors and Solutions*. 127–137.
- Oktavia Dwi, Trihantoyo Syunu, W. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Tambaksari I. *Journal on Education*, 05, No. 04.
- Pardede, L., & Simanjuntak, H. (2020). Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Islamika*, 2(1), 129–139.
- Sampul, H. (2023). *Analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) di mts darun najah kajeksan, tulangan, sidoarjo*.
- Santoso, G. (2019). MODEL OF DEVELOPMENT OF CURRICULUM CONTENT OF CIVIC EDUCATION (1975-2013) IN INDONESIA CENTURY 21st. *Proceedings of Educational Initiatives Research Colloquium 2019*, 23(1), 131–141.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21 Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(01), 157–170.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih, dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 2(1), 284–296. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/138>

- Santoso, G., Imawati, S., & Yusuf, N. (2022). Development Teacher And Method For Improving Pancasila and Civic Education (PCE). *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia*, 1. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335935>
- Santoso, G., Khairasyani, I., Listiani, S., Rachmadani, N. O., Sakiinah, N., Hanjani, S. S., Kamilah, D. P., & Ainni, P. N. (2023). Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Sumpah Pemuda Sebagai Persatuan Bangsa Untuk Membangun Negara Yang Berdikari Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(02), 360–370.
- Santoso, G., Marsella, A. T., Permana, D. A., & Syifa, K. (2023). Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Efek Pengaruh Sumpah Pemuda Terhadap Generasi Z Dalam Ikut Serta di Kegiatan Kemanusiaan Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(02), 246–255.
- Santoso, G., & Muhtadin, I. (2022). Development of Civic Education Through Civic Skills at Primary School. *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia*, 4. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335936>
- Santoso, G., Rahmawati, P., Murod, M., & Setiyaningsih, D. (2023). Hubungan Lingkungan Sekolah dengan Karakter Sopan Santun Siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 91–99. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/131/36>
- Sarmini, D., Haryati, E., Roekminiati, S., & ... (2013). Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Optimalisasi Peran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna. ... *Pemberdayaan ...*
- Simaremare, J., Asbari, M., Santoso, G., & Rantina, M. (2023). Sastra Menjadi Pedoman Sehari-hari Telaah Singkat Karya Sastra Menurut Para Ahli. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(03), 57–60.
- Siswanto, A. (2017). Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bantul. *Jurnal Hanata Widya*, 6(2), 55–65.
- Sodikin, Santoso, G., Sakinah, A. A., Syariuddin, A., & Christi, S. L. (2024). Menjelajahi Dimensi: Pengukuran Panjang dan Berat dalam Kehidupan Sehari-hari Versi Mahasiswa. *Jupetra: Jurnal Pendidikan Transformatif*, 03(01), 19–27.
- Tuban, K. (2023). *Analisis Pelayanan Penyaluran Dana Bos di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Nur Cholis, Ika Devy Pramudiana SMIA – Edisi Khusus Tema Pelayanan Publik Tahun 2023*. 363–374.
- Utari, R. (2007). *Modul penyusunan rkas. sekolah sebagai organisasi penyedia*, 1–41.
- Www.kemkes.go.id. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat*.